

**ANALISIS PENERIMAAN DAERAH SEKTOR
PARIWISATA SEKABUPATEN/KOTA DI JAWA
TENGAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHINYA**

SKRIPSI



Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**EKO SAPUTRO
NIM. C2B009018**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Eko Saputro

Nomor Induk Mahasiswa : C2B009018

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERIMAAN DAERAH
SEKTOR PARIWISATA
SEKABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
DAN FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHINYA**

Dosen Pembimbing : Evi Yulia Purwanti, SE., MSi.,

Semarang, Maret 2015

Dosen Pembimbing,

(Evi Yulia Purwanti, SE., MSi.,)

NIP. 19710725.1997022001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Eko Saputro

Nomor Induk Mahasiswa : C2B009018

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERIMAAN DAERAH
SEKTOR PARIWISATA
SEKABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH
DAN FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHINYA**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal Maret 2015

Tim Penguji

1. Evi Yulia Purwanti, SE., MSi., (.....)
2. Achma Hendra Setiawan, SE, M.Si (.....)
3. Arif Pujiyono, SE, M.Si. (.....)
4. Anis Chariri SE, M.Com, Ph.D., Akt. (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Eko Saputro, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : **ANALISIS PENERIMAAN DAERAH SEKTOR PARIWISATA SEKABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemungkinan terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, Maret 2015

Yang membuat pernyataan,

(Eko Saputro)

NIM : C2B009018

ABSTRACT

High potential in tourism is still underutilized to increase revenue (PAD) Central Java. Factors thought to influence the reception area of the tourism industry in Central Java are the number of tourists, GDP, investment in the tourist industry and the number of tourist attraction. The purpose of this study was to, analyze the influence of the number of tourists, GDP, investment and number of sights to the reception area of the tourism industry in Central Java.

The independent variables used in this study is the number of tourists, GDP, investment and the amount of tourism and the dependent variable is the reception area of the tourism industry. The data used in this research is the data the number of tourists, GDP, investment, number of sights and reception areas of the tourism industry in the 35 counties and cities in Central Java. The data used is secondary data. The analysis technique used is multiple linear regression.

According to analysis done can be seen that the number of tourists and GDP positive effect on the tourism sector of the reception area while the number of tourism and investment in the tourism industry does not affect the reception area of the tourism sector. multiple linear regression test showed that both regression models to be used to predict the reception area of the tourism sector. While the reception area of the tourism sector can be explained by the independent variable is the amount of tourism, the number of tourists, investment in the tourism industry and the GDP of 51.8%.

Key words: Area reception, the number of tourists, GDP, investment, number of tourist attraction.

ABSTRAK

Potensi wisata daerah Jawa Tengah yang tinggi masih kurang dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Jawa Tengah adalah jumlah wisatawan, PDRB, investasi di industri wisata dan jumlah obyek wisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah wisatawan, pendapatan per kapita, investasi dan jumlah obyek wisata terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Jawa Tengah.

Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah wisatawan, PDRB, investasi dan jumlah obyek wisata dan variabel terikatnya adalah penerimaan daerah dari industri pariwisata. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data jumlah wisatawan, pendapatan per kapita, investasi, jumlah obyek wisata dan penerimaan daerah dari industri pariwisata pada 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa jumlah wisatawan dan PDRB berpengaruh positif terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata sedangkan jumlah obyek wisata dan investasi di industri pariwisata tidak berpengaruh terhadap penerimaan daerah sektor pariwisata. pengujian regresi linier berganda menunjukkan bahwa model regresi baik untuk dipergunakan untuk memprediksi penerimaan daerah sektor pariwisata. Sedangkan penerimaan daerah sektor pariwisata mampu dijelaskan oleh variabel independen yaitu jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, investasi di industri pariwisata dan PDRB sebesar 51,8%.

Kata kunci : Penerimaan daerah, jumlah wisatawan, PDRB, investasi, jumlah obyek wisata.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada kita bersama dan khususnya bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini diberi judul **“ANALISIS PENERIMAAN DAERAH SEKTOR PARIWISATA SEKABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam mencapai derajat sarjana pada Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, petunjuk, dan saran dari semua pihak. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Prof. Sudharto P. Hadi, MES., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Dr. Suharnomo MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Dr. Hadi Sasana, M.Si. Selaku Kepala Jurusan Ilmu Ekonomi Sosial Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Evi Yulia Purwanti, SE., MSi selaku Dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk arahan, bimbingan, petunjuk, dan nasehat dalam proses pembuatan skripsi sampai selesai.
5. Drs. Y. Bagio Mudakir MSP selaku Dosen wali atas bimbingan dan ilmu yang bermanfaat.
6. Seluruh staf dan pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat.
7. H. Hanafi dan Hj. Siti Aminah serta Bapak Sujadi dan Ibu Tri Sudjiyanti selaku orang tua tercinta atas doa, kasih sayang, pengorbanan, motivasi, bimbingan, nasehat, bekal ilmu hidup, dan segalanya sehingga penulis

dapat melewati segala sesuatu dalam menjalankan hidup serta mendapat kelancaran dalam membuat skripsi.

8. Istri tercinta Devi Ranita Sari serta buah hatiku tersayang yang terus memberikan doa dan semangat.
9. Teman-teman kuliah terutama seluruh teman-teman sekelas IESP 2009 dan Teknik Mesin 2007 yang tidak bisa di sebutkan satu persatu yang telah memberi semangat, dorongan, motivasi dan bantuan dalam penyelesaian skripsi.
10. Rekan kerja PT. Puja Perkasa, PT. Adhi Karya dan PT. KADII Internasional yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan dengan yang lebih baik.

Demikian penyusunan skripsi ini tidak lepas adanya kekurangan. Untuk itu penulis mengharapakan saran dan masukan guna perbaikan selanjutnya serta semoga bermanfaat.

Semarang, Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian.....	13
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Penerimaan Daerah.....	15
2.1.2 Penerimaan Pariwisata.....	16
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah.....	18
2.1.4 Pajak Daerah.....	19
2.1.5 Retribusi Daerah.....	23
2.1.6 Kepariwisataaan	26
2.1.7 Wisatawan dan Hubungan Jumlah Wisatawan Dan Penerimaan Daerah Dari Industri Pariwisata	29
2.1.8 PDRB dan Hubungan PDRB di Industri Pariwisata dengan Penerimaan Daerah di Industri Pariwisata.....	33
2.1.10 PDRB dan Hubungan PDRB di Industri Pariwisata dengan Penerimaan Daerah di Industri Pariwisata.....	36
2.1.11 Jumlah Objek Wisata dan Hubungan Jumlah Objek Wisata Dengan Penerimaan Daerah Dari Industri Pariwisata	40
2.2 Penelitian Terdahulu	41
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis	45
2.4 Hipotesis	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	50
3.1.1 Variabel Penelitian	50
3.1.2 Definisi Operasional.....	50
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	52
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	53
3.4 Metode Analisis Data.....	53
3.4.1 Uji Asumsi Klasik	53

3.4.2 Analisis Regresi.....	56
3.4.3 Uji Kriteria Statistik	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	62
4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	62
4.2 Statistik Deskriptif	65
4.2.1 Jumlah obyek wisata.....	65
4.2.2 Jumlah wisatawan.....	66
4.2.3 Investasi di industri pariwisata	67
4.2.4 PDRB.....	68
4.2.5 Penerimaan daerah sektor pariwisata	69
4.3 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	70
4.3.1 Deteksi Multikolinieritas	70
4.3.2 Deteksi Heteroskedastisitas	72
4.3.3 Deteksi Normalitas	72
4.3.4 Deteksi Autokorelasi	74
4.4 Analisis Regresi Linier Berganda	74
4.4.1 Analisis Koefisien Determinasi.....	76
4.4.2 Uji Kelayakan Model (<i>Goodness Of Fit</i>)	77
4.4.3 Uji Hipotesis Parsial (t Test)	78
4.5 Pembahasan.....	81
4.5.1 Pengaruh Jumlah obyek wisata terhadap Penerimaan daerah sektor pariwisata	81
4.5.2 Pengaruh Jumlah wisatawan terhadap Penerimaan daerah sektor pariwisata	82
4.5.3 Pengaruh Investasi di industri pariwisata terhadap Penerimaan daerah sektor pariwisata	83
4.5.4 Pengaruh PDRB terhadap Penerimaan daerah sektor pariwisata	84
BAB V PENUTUP.....	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN A	
LAMPIRAN B	
LAMPIRAN C	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha	2
Tabel 1.2 Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto	5
Tabel 1.3 PAD Sektor Pariwisata dan Non Pariwisata	6
Tabel 1.4 Tingkat Pertumbuhan Wisatawan Di Provinsi Jawa Tengah.....	7
Tabel 1.5 Jumlah Hotel Berbintang dan Hotel Melati di Jawa Tengah	8
Tabel 1.6 Jumlah Objek Wisata di Jawa Tengah	10
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	46
Tabel 4.1 PDRB Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah	66
Tabel 4.2 Jumlah Obyek Wisata di Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah	68
Tabel 4.3 Jumlah Wisatawan di Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah	69
Tabel 4.4 Investasi di industri pariwisata di Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah.....	70
Tabel 4.5 PDRB Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah	72
Tabel 4.6 Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten dan Kota Di Jawa Tengah.....	73
Tabel 4.7 Hasil Deteksi Multikolinearitas	75
Tabel 4.8 Hasil Uji Glejser	76
Tabel 4.9 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov	77
Tabel 4.10 Persamaan Regresi Linier Berganda	78
Tabel 4.11 Koefisien Determinasi.....	79
Tabel 4.12 Hasil Uji F.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Data Penelitian

Lampiran B Hasil Analisis Regresi dengan Output SPSS

Lampiran C Data Pendukung Lainnya

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 tentang penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan pemerintah daerah oleh pemda dan DPRD menganut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Pemerintah pusat tidak lagi mengatur, mendominasi pemerintah dan masyarakat daerah. Peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

Perkembangan ekonomi Jawa Tengah dapat ditunjukkan melalui nilai PDRB dari tahun ke tahun. PDRB menggambarkan produktivitas dari suatu daerah dalam melakukan kegiatan ekonomi. Pada tabel 1.1 ditunjukkan besarnya PDRB Jawa Tengah dari tahun 2008 hingga 2012.

Pada periode tersebut, porsi terbesar PDRB Jawa Tengah disumbangkan oleh sektor industri pengolahan yang semakin meningkat dalam kurun 5 tahun terakhir. Sektor pariwisata menempati urutan kedua setelah sektor industri pengolahan yang meningkat dalam 5 tahun terakhir. Sektor pariwisata meliputi perdagangan, hotel, dan restoran. Sektor pertanian menempati urutan ketiga dalam sumbangan perekonomian Jawa Tengah.

Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga
Tahun 2008-2012 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2008	2009	2010
Pertanian	32.880.707,85	34.101.148,13	34.955.957,64
Pertambangan dan Galian	1.851.189,43	1.952.866,70	2.091.257,42
Industri Pengolahan	55.348.962,88	57.444.185,45	61.390.101,24
Listrik, Gas, dan Air Bersih	1.408.666,12	1.489.552,65	1.614.857,68
Konstruksi	9.647.593,00	10.300.647,63	11.014.598,60
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	35.226.196,01	37.766.356,61	40.055.356,39
Pengangkutan dan komunikasi	8.581.544,49	9.192.949,90	9.805.500,11
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	6.218.053,97	6.701.533,13	7.038.128,91
Jasa-Jasa	16.871.569,54	17.724.216,37	19.029.722,65
Total Produk Domestik Regional Bruto	168.034.483,29	176.673.456,57	186.995.480,60

Sumber : BPS JATENG tahun 2009-2013, diolah

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pendapatan perkapita yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan intensif bagi diubahnya struktur produksi (pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan akan produk-produk pertanian) .

PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Pada umumnya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata mempunyai tingkat sosial ekonomi yang tinggi yang memiliki trend hidup dan waktu senggang serta pendapatan (income) yang relatif besar. Artinya dengan kebutuhan hidup minimum yang sudah terpenuhi, mempunyai cukup uang untuk membiayai perjalanan wisata.

Semakin besar tingkat pendapatan perkapita masyarakat maka semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata, yang pada akhirnya berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan daerah sektor pariwisata di Jawa Tengah. Dilihat dari sektor perekonomian dengan klasifikasi 9 sektor, ada tiga sektor yang mempunyai sumbangan terbesar dalam PDRB Jawa Tengah, yaitu sektor industri pengolahan, pariwisata, dan pertanian. Tabel 1.2 menunjukkan kontribusi PDRB Jawa Tengah.

Tabel 1.2
Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
2000 Jawa Tengah
Tahun 2008-2012

Lapangan Usaha	2008	2009	2010	2011	2012
Pertanian	19,57	19,30	18,69	17,85	17,41
Pertambangan	1,10	1,11	1,12	1,11	1,12
Industri Pengolahan	32,94	32,51	32,83	33,01	32,73
Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,84	0,84	0,86	0,86	0,86
Konstruksi	5,74	5,83	5,89	5,93	5,96
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	20,96	21,38	21,42	21,77	22,16
Pengangkutan dan komunikasi	5,11	5,20	5,24	5,37	5,45
Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan	3,70	3,79	3,76	3,78	3,89
Jasa-Jasa	10,04	10,03	10,18	10,32	10,42
Total Produk Domestik Regional Bruto (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS JATENG tahun 2009-2013, diolah

Pada tabel 1.2 terlihat bahwa industri pengolahan memberikan sumbangan terbesar diikuti sektor pariwisata (perdagangan, hotel, dan restoran), pertanian, jasa, konstruksi, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, pertambangan, listrik, gas dan air bersih. Rata-rata sumbangan sektor industri pengolahan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sebesar 32,8%. Sumbangan sektor pariwisata sebesar 21,54%. Sumbangan sektor pertanian sebesar 18,6%.

Secara umum pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dalam kurun 5 tahun terakhir mengalami peningkatan. Meningkatnya ekonomi Jawa tengah memberikan sumbangan pendapatan asli daerah (PAD). Tabel 1.3 menunjukkan PAD Jateng berdasarkan sektor pariwisata dan non pariwisata, serta kontribusinya terhadap PAD Jateng se kabupaten/kota tahun 2008-2012.

Tabel 1.3
PAD Sektor Pariwisata dan Non Pariwisata Beserta K
Terhadap PAD Se Kabupaten/Kota Jawa T
Tahun 2008-2012

Tahun	PAD Se Kabupaten/kota Jateng Berdasarkan Sektor		PAD Jateng Total Se Kabupaten/Kota (Rp)	Kont P Pari (%
	Pariwisata (Rp)	Non Pariwisata (Rp)		
2008	66,027,315	2,248,510,708	2,314,538,023	2
2009	79,582,205	2,487,454,896	2,567,037,101	3
2010	112,985,539	2,835,441,969	2,948,427,508	3
2011	130,061,621	3,592,901,676	3,722,963,297	3
2012	160,742,903	4,708,818,278	4,869,561,181	3

Sumber : BPS JATENG tahun 2009-2013, diolah

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa PAD sektor pariwisata sekabupaten/kota Jawa tengah selama kurun 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 66.027.315 menjadi 160.7428.903. PAD sektor non pariwisata sekabupaten/kota Jawa tengah selama kurun 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang lebih besar dibanding PAD sektor pariwisata, yaitu sebesar 2.248.520.708 menjadi 4.708.818.278. PAD non pariwisata berkontribusi lebih besar daripada PAD pariwisata, yaitu selama kurun 5 tahun terakhir rata-rata kontribusinya 96,68%, sedangkan sektor pariwisata rata-rata kontribusinya sebesar 3,32%

Sektor industri non pariwisata memiliki kontribusi yang tinggi bagi PAD Jawa Tengah, sementara itu dari sektor pariwisata memiliki kontribusi yang cukup tinggi bagi PAD Jawa Tengah. Sektor pariwisata memiliki peranan penting dan cukup besar bagi PAD Jawa tengah. Sektor ini didukung oleh peranan kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Jawa Tengah sebagai penunjang besarnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Jawa Tengah. Tabel 1.4 menunjukkan tingkat pertumbuhan wisatawan di Jawa Tengah.

Tabel 1.4
Tingkat Pertumbuhan Wisatawan Di Provinsi
Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Wisatawan (Orang)		Lama Tinggal Wisatawan (Hari)	
	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus
2008	302.977	16.253.107	2,22	1,91
2009	308.519	21.515.598	2,23	1,94
2010	317.805	22.275.146	1,57	1,32
2011	381.514	21.838.351	1,89	1,35
2012	363.150	25.240.007	1,65	1,36

Sumber : BPS JATENG tahun 2009-2013, diolah

Pada tabel 1.4 dapat dilihat pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara yang selama kurun 5 tahun terakhir mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2011 dan 2012 menurun, hal ini dikarenakan pada tahun tersebut Jawa Tengah mengalami bencana alam sehingga menurunkan aktivitas kunjungan wisatawan. Berdasarkan dari rata-rata kunjungan, wisatawan nusantara selama 5 tahun terakhir jauh lebih besar dibandingkan kunjungan wisatawan mancanegara. Rata-rata pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara sebesar 4,07%, sedangkan rata-rata pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara sebesar 10,5%.

Hotel adalah tempat yang disediakan bagi para wisatawan untuk menginap selama mereka berkunjung atau tempat dalam melakukan kegiatan wisata. Disamping itu, sebelum melakukan perjalanan wisata, seorang wisatawan memerlukan informasi mengenai daerah yang akan dituju beserta fasilitas-fasilitasnya. Hotel merupakan sarana akomodasi utama yang ingin diketahui oleh wisatawan sebelum melakukan suatu perjalanan. Oleh karena itu, keberadaan hotel adalah mutlak diperlukan. Tabel 1.5 menunjukkan jumlah hotel berbintang dan melati di Jawa Tengah.

Tabel 1.5
Jumlah Hotel Berbintang dan Hotel Melati di
Jawa Tengah
Tahun 2008-2012

Tahun	Hotel	
	Berbintang	Melati
2008	106	1090
2009	113	1180
2010	119	1225
2011	131	1237
2012	139	1302

Sumber : BPS JATENG tahun 2009-2013, diolah

Dalam lima tahun terakhir jumlah hotel berbintang dan melati yang tersedia terus menerus mengalami peningkatan. Jumlah hotel berbintang selama kurun 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari 106 hotel menjadi 139 hotel. Jumlah hotel melati selama kurun 5 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 1090 hotel menjadi 1302 hotel.

Dengan meningkatnya jumlah hotel dari tahun ke tahun diharapkan juga dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga menarik banyak investor untuk menanamkan modal di Jawa Tengah, khususnya untuk sektor perhotelan. Upaya menarik investasi juga dapat dilakukan dengan memberikan berbagai kemudahan prosedur dan mengurangi birokrasi.

Salah satu faktor yang membuat seseorang untuk mengunjungi suatu daerah adalah karena adanya obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi di daerah tersebut. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menciptakan atau membuka obyek-obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi.

Jawa Tengah merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) potensi yang dimiliki beraneka ragam, baik obyek wisata alam, budaya, maupun buatan yang terletak diberbagai tempat di Jawa Tengah. Setiap tahunnya dapat bertambah maupun berkurang. Penambahan dapat terjadi apabila pemerintah daerah membangun obyek wisata baru, yaitu berupa obyek wisata buatan, atau membuka obyek wisata alam yang sebelumnya tertutup untuk umum. Sedangkan pengurangan bisa terjadi apabila pemerintah daerah menutup obyek wisata dikarenakan sedang dalam perbaikan atau tidak adanya dana untuk melakukan perawatan terhadap suatu obyek wisata sehingga ditutup untuk umum. Tabel 1.6 menunjukkan jumlah objek wisata di Jawa Tengah.

Tabel 1.6
Jumlah Objek Wisata di Jawa Tengah
Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Objek Wisata
2008	255
2009	257
2010	266
2011	284
2012	385

Sumber : JDA tahun 2013, diolah

Dilihat lima tahun terakhir jumlah objek wisata mengalami peningkatan dari 255 menjadi 385. Dengan demikian semakin banyaknya jumlah obyek wisata yang ada, maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Jawa Tengah, baik melalui pajak daerah maupun retribusi daerah.

Walaupun industri pariwisata bukan menjadi industri yang mendapat prioritas utama dalam meningkatkan perekonomian daerah, namun industri pariwisata dapat menjadi industri pendukung yang sangat potensial dalam memperbaiki struktur ekonomi daerah serta dapat meningkatkan kemandirian dan

daya saing daerah, seharusnya dengan meningkatnya jumlah fasilitas penunjang pariwisata seperti penginapan dan jasa perjalanan pariwisata yang ditawarkan, jumlah pengunjung dan pendapatan dari industri pariwisata di Jawa Tengah dapat lebih ditingkatkan lagi, dengan demikian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Jawa Tengah.

1.2 Perumusan Masalah

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui dampak industri pariwisata terhadap perekonomian daerah, dan juga sebagai salah satu faktor penentu dalam melihat tingkat kemandirian daerah adalah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima daerah tersebut. Keterkaitan industri pariwisata dengan penerimaan daerah berjalan melalui PAD dari industri pariwisata. PAD industri pariwisata ini bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi penginapan/pesanggrahan/villa, dan retribusi tempat rekreasi.

Jawa Tengah memiliki potensi pariwisata yang besar untuk dikembangkan. Hal ini dapat dilihat melalui semakin bertambahnya jumlah hotel di Jawa Tengah selama lima tahun terakhir. Namun potensi yang tinggi tersebut masih kurang dimanfaatkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah sebagaimana terlihat pada Tabel 1.3 yang menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir kontribusi penerimaan PAD industri pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah masih cenderung kecil apabila dibandingkan dengan kontribusi industri non pariwisata. Hal ini kontras apabila dibandingkan dengan PAD sector wisata provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

yang mencapai hampir 50% dari PAD daerah. Oleh karena itu, perlu diadakan studi mengenai penerimaan daerah dari industri pariwisata untuk mengetahui apakah faktor-faktor seperti jumlah wisnus dan wisman, investasi di industri pariwisata, jumlah objek wisata, serta pendapatan perkapita mempengaruhi penerimaan daerah dari industri pariwisata agar memperoleh jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada. Adapun pertanyaan penelitian yang akan dibahas adalah:

1. Apakah jumlah wisnus dan wisman mempengaruhi penerimaan daerah dari industri pariwisata di Jawa Tengah?
2. Apakah pendapatan perkapita mempengaruhi penerimaan daerah dari industri pariwisata di Jawa Tengah?
3. Apakah investasi di industri pariwisata mempengaruhi penerimaan daerah dari industri pariwisata di Jawa Tengah?
4. Apakah jumlah objek wisata mempengaruhi penerimaan daerah dari industri pariwisata di Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Menganalisis pengaruh jumlah wisnus dan wisman terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Jawa Tengah
2. Menganalisis pendapatan perkapita terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Jawa Tengah

3. Menganalisis pengaruh investasi di industri pariwisata terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Jawa Tengah
4. Menganalisis jumlah objek wisata terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Jawa Tengah

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada:

1. Pengambil Kebijakan

Bagi pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berguna dalam menentukan kebijakan yang tepat guna meningkatkan penerimaan daerah dari industri pariwisata

2. Ilmu Pengetahuan

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang lain. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yaitu dapat menambah kajian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang Masalah Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran Teoritis, dan Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan Variabel Penelitian dan Definisi Operasional, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta Metode Analisis Data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan Gambaran Umum Obyek Penelitian, Statistik Deskriptif, Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik, Analisis Regresi Berganda dan Pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Penerimaan Daerah

Menurut Djaenuri (2012) untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta provinsi dan kabupaten / kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah.

Sejalan dengan UU No. 25 Tahun 1999 tersebut, Lains (1985) dalam Taufiq (2004) mengemukakan bahwa untuk dapat memiliki keuangan yang memadai, daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup pula. Dalam hal ini daerah dapat memperolehnya dengan beberapa cara, diantaranya sebagai berikut:

1. Dapat mengumpulkan pajak daerah yang telah disetujui pemerintah pusat
2. Melakukan pinjaman
3. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak negara yang dipungut di daerah
4. Menambah tarif pajak negara tersebut
5. Menerima bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat

Berdasarkan pasal 157 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Hasil pajak daerah

- 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan
- 1) Dana bagi hasil
 - 2) Dana alokasi umum
 - 3) Dana alokasi khusus
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menyatakan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah:

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Dana perimbangan
- c. Pinjaman daerah
- d. Lain-lain penerimaan yang sah, antara lain hibah, dana darurat, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Penerimaan Pariwisata

Menurut Kartinah (2001) sektor pariwisata merupakan salah satu potensi yang sangat mendukung pasokan devisa negara secara nyata, langsung maupun tidak langsung dapat

dinikmati oleh para pelaku sektor tersebut secara riil. Bisnis pariwisata merupakan salah satu sektor penyumbang perolehan devisa yang cukup besar bagi negara khususnya wisatawan mancanegara. Sedangkan wisatawan domestik akan merupakan sumber PAD yang potensial pada era otonomi daerah yang terus dikembangkan karena peluang yang cukup besar.

Menurut Pitana dan Diarta (2012) pengeluaran dari wisatawan secara langsung ataupun tidak langsung merupakan sumber pendapatan dari beberapa perusahaan, organisasi, atau masyarakat perorangan yang melakukan usaha di sektor pariwisata. Jumlah wisatawan yang banyak merupakan pasar bagi produk lokal. Masyarakat secara perorangan juga mendapat penghasilan jika mereka bekerja dan mendapat upah dari pekerjaan tersebut. Pekerjaan disektor pariwisata sangat beragam, seperti pengusaha pariwisata, karyawan hotel dan restoran, karyawan agen perjalanan, penyedia jasa transportasi, pemandu wisata, penyedia souvenir, atraksi wisata, dan lain-lain.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka penerimaan pariwisata dalam penelitian ini adalah pembayaran atas layanan yang diberikan oleh perusahaan atau tempat usaha yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh wisatawan, khususnya dapat dilihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) industri pariwisata yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi vila/pesanggrahan, serta retribusi tempat rekreasi.

$$TR \text{ Wisata} = P.Q$$

$$Tr \text{ Wisata} = P.f(Q)$$

Tr Wisata = P.f (objek hotel + objek restoran + objek hiburan + retribusi villa + retribusi tempat rekreasi

Dimana :

Tr Wisata : Pajak dan retribusi

P : Pajak : tarif pajak retribusi : tarif retribusi

Q : Objek pajak dan objek retribusi

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Menurut Djaenuri (2012) pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Taufiq (2004) pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Anggraeni dan Puranata (2010) besar kecilnya PAD akan mempengaruhi otonomi daerah dalam melaksanakan kebijakannya, semakin besar PAD maka kemampuan daerah akan lebih besar dan ketergantungan dengan pemerintah atasan semakin berkurang. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah, dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Objek PAD antara lain untuk provinsi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, retribusi pelayanan kesehatan dan lain-lain.

Menurut Rahayu (2002) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan otonomi daerah yaitu kewenangan daerah otonom untuk pemerintahan. Peranan PAD dalam keuangan daerah merupakan salah satu tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dilingkungkannya masing-masing. Semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD maka akan semakin besar pula tersedianya jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan yang bersifat mandiri, dan semakin besar pula kekuasaan daerah yang bersangkutan untuk mengarahkan penggunaan keuangan sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan skala prioritas daerah yang bersangkutan.

2.1.4 Pajak Daerah

2.1.4.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Djenuri (2004) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Menurut Trisni dan Tarsis (2012) pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Pajak Provinsi terdiri dari :
 - a. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air

- b. Pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - c. Pajak bea balik nama tanah (pulasi)
 - d. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
 - e. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
 - f. Pajak izin penangkapan ikan di wilayahnya
2. Pajak Kabupaten / Kota, terdiri dari :
- a. Pajak hotel
 - b. Pajak restoran
 - c. Pajak hiburan
 - d. Pajak reklame
 - e. Pajak penerangan jalan
 - f. Pajak pengambilan bahan galian golongan C
 - g. Pajak parkir
 - h. Pajak anjing
 - i. Pajak pertunjukan dan keramaian umum
 - j. Pajak kendaraan tidak bermotor
 - k. Pajak pembangunan
 - l. Pajak radio
 - m. Pajak bangsa asing
 - n. Pajak potong hewan
 - o. Pajak lain-lain

2.1.4.2 Pajak Hotel

Menurut Djaenuri (2012) pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap / istirahat, memperoleh pelayanan, dan / atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Pajak hotel 10%. Tarif pajak hotel dikenakan atas jumlah pembayaranyang dilakukan kepada hotel.

Menurut Bagyono (2012) hotel adalah jenis akomodasi yang dikelola secara komersial dan profesional, disediakan bagi setiap orang untuk mendapatkan pelayanan penginapan, makan dan minum serta pelayanan lainnya.

2.1.4.3 Pajak Restoran

Menurut Djaenuri (2004) pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan / minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha boga atau chatering. Pajak restoran 10%. Tarif pajak restoran dikenakan atas jumlah pembayaranyang dilakukan kepada restoran.

Menurut Bagyono (2012) restoran yaitu usaha jasa boga yang dikelola secara komersial, menyediakan pelayanan makan dan minum. Restoran dapat berdiri sendiri dengan membangun tempat khusus. Sementara restoran yang berada di dalam sebuah hotel umumnya dikelola oleh hotel itu sendiri, dan manajemennya dibawah tanggung jawab departemen makanan dan minuman.

2.1.4.4 Pajak Hiburan

Menurut Djaenuri (2004) pajak hiburan adalah pajak atas pennyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan,

permainan ketangkasan, dan / keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga. Pajak hiburan 35%. Tarif pajak hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan / menikmati hiburan.

2.1.4.5 Fungsi Pajak

Menurut Trisni dan Tarsis (2012) fungsi pajak terdiri atas:

- a. **Fungsi Anggaran**
Sebagai pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak.
- b. **Fungsi Mengatur**
Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
- c. **Fungsi Stabilitas**
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
- d. **Fungsi Redistribusi Pendapatan**

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.5 Retribusi Daerah

2.1.5.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Trisni dan Tarsis (2012) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Saragih (2003) retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Perbedaan antara pajak daerah dan retribusi daerah tidak hanya didasarkan atas objek, tetapi juga perbedaan atas pendekatan tarif. Oleh sebab itu, tarif retribusi bersifat fleksibel sesuai dengan tujuan retribusi dan besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah masing-masing untuk melaksanakan atau mengelola jenis pelayanan publik di suatu daerah, maka semakin kecil tarif retribusi yang dikenakan.

Menurut Rahayu (2002) retribusi merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah karena seseorang (badan hukum) menggunakan jasa atau barang pemerintah yang langsung dapat ditunjuk, jadi retribusi lebih menyerupai harga

dalam proses jual beli secara bebas kecuali retribusi mempunyai fungsi lainnya, misalnya retribusi parkir lebih ditujukan mengurangi kepadatan lalu lintas.

2.1.5.2 Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Menurut Djaenuri (2012) jenis retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum

Jasa umum antara lain adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa urusan umum pemerintahan.

b. Retribusi Jasa Usaha

Jasa usaha antara lain adalah penyewaan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintahan daerah, penyedia tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil dan penjualan bibit.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi. Perizinan tertentu yang dapat dipungut retribusi, antara lain adalah izin mendirikan bangunan dan izin peruntukan penggunaan tanah.

2.1.5.3 Objek Retribusi Daerah

Menurut Trisni dan Tarsis (2012) objek retribusi daerah terbagi menjadi :

- a. Retribusi Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial
- c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan

2.1.5.4 Subjek Retribusi Daerah

Menurut Trisni dan Tarsis (2012) subjek retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan
- b. Retribusi Jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan
- c. Retribusi Perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah

2.1.6 Kepariwisataan

2.1.6.1 Pariwisata

Menurut Yoeti (2001) terdapat empat kriteria suatu perjalanan disebut sebagai pariwisata, yaitu :

- a) Perjalanan itu semata-mata untuk bersenang-senang
- b) Perjalanan itu harus dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain.
- c) Perjalanan itu dilakukan minimal selama 24 jam
- d) Perjalanan itu tidak dikaitkan dengan mencari nafkah ditempat yang dikunjungi dan orang yang melakukan perjalanan itu semata-mata sebagai konsumen ditempat yang dikunjunginya

Menurut Soekadijo (1997) pariwisata adalah suatu gejala sosial yang sangat kompleks, yang menyangkut manusia seutuhnya dan memiliki berbagai aspek: sosiologis, psikologis, ekonomis, ekologis dan sebagainya. Aspek yang mendapat perhatian yang paling besar dan hampir-hampir merupakan satu-satunya aspek yang dianggap penting ialah aspek ekonomisnya.

Menurut Hunziker dan Krapf (1942) dalam Yoeti (2001) pariwisata adalah total keseluruhan dari hubungan-hubungan dan gejala yang timbul dari perjalanan dan pendiaman orang-orang asing sepanjang pendiaman itu tidak bermaksud menjadi penduduk yang menetap dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan mencari nafkah di tempat yang dikunjungi.

Menurut Intosh dan Gupta dalam Pendit (1999) pariwisata adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis,

pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan ini serta para pengunjung lainnya.

Menurut Spillane (1993) pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ke tempat yang lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, budaya, alam, dan ilmu.

2.1.6.2 Industri

Menurut Spillane (1993) kata “industri” mengandung pengertian suatu rangkaian perusahaan-perusahaan yang menghasilkan “produk” tertentu.

Menurut Dimiyati (2004) industri adalah sektor perekonomian yang terbagi atas beberapa sektor, yaitu :

- a) Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan.
- b) Pertambangan dan penggalian.
- c) Industri pengolahan.
- d) Listrik, gas, dan air.
- e) Bangunan.
- f) Perdagangan, rumah makan, dan hotel.
- g) Angkutan, penggudangan, dan komunikasi.
- h) Keuangan, asuransi, dan usaha persewaan bangunan.
- i) Jasa-jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan.

2.1.6.3 Industri Pariwisata

Menurut Atmadilaga dalam Yoeti (2001) industri pariwisata adalah Serangkaian perusahaan yang satu sama lain terpisah, sangat beraneka ragam dalam skala, fungsi, lokasi, dan bentuk organisasi, namun mempunyai kaitan

fungsional terpadu dalam menghasilkan berbagai barang atau jasa bagi kepentingan kebutuhan wisatawan dalam perjalanan dan keperluan lainnya yang berkaitan. Sedangkan produk industri pariwisata adalah aneka jasa dan kebutuhan wisatawan yang ditawarkan secara terpisah oleh masing-masing bidang usaha, namun mempunyai kaitan fungsional terpadu dalam rangka memuaskan seluruh pengalaman wisatawan, sejak mulai berangkat dari rumah sampai kembali ke tempat asal.

Menurut Soekadijo (1999) Industri pariwisata adalah industri yang kompleks, yang meliputi industri-industri lain. Dalam kompleks industri pariwisata terdapat industri perhotelan, industri rumah makan, industri kerajinan, industri perjalanan, dan sebagainya.

Menurut Mill dan Morrison dalam Yoeti (2008) bahwa sebagai suatu industri, pariwisata tidak dapat diukur, karena tidak memiliki standar nomor kualifikasi. Sebenarnya, dari sudut pandang politis ide memberi istilah “ Tourism Industry ” itu memberi peluang untuk memperlihatkan kepada orang banyak bahwa pariwisata memberikan dampak positif, dapat berfungsi menjadi katalisator dalam pembangunan.

Menurut Spillane (1993) pariwisata sebagai industri jasa yang digolongkan sebagai industri ketiga, berperan penting dalam menetapkan kebijaksanaan tentang kesempatan kerja. Peranan pariwisata dalam pembangunan negara pada garis besarnya berintikan tiga segi, yakni segi ekonomi (sumber devisa, pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan asing, tetapi juga untuk

wisatawan domestik yang kian meningkat peranannya). Dengan demikian, industri pariwisata juga dapat memajukan dan meratakan perekonomian negara karena kegiatan pariwisata merupakan sektor yang mempunyai daya serap besar terhadap pengangguran dan meningkatkan pendapatan penduduk.

Produk wisata sebenarnya bukanlah merupakan produk yang nyata. Produk wisata merupakan rangkaian jasa orang yang tidak hanya mempunyai segi-segi yang bersifat ekonomis, tetapi segi-segi yang bersifat sosial, psikologis, dan alamiah. Jasa-jasa yang diusahakan oleh berbagai perusahaan itu terkait menjadi suatu produk wisata. Sebagai industri rangkaian perusahaan yang biasa merupakan unsur industri wisata adalah perusahaan penginapan, angkutan wisata, perusahaan biro perjalanan, perusahaan restoran, dan perusahaan hiburan.

Menurut Dimiyati (2004) industri pariwisata adalah industri yang menghasilkan devisa, menimbulkan transaksi trilyunan rupiah, menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan produk.

2.1.7 Wisatawan dan Hubungan Jumlah Wisatawan Dan Penerimaan Daerah Dari Industri Pariwisata

2.1.7.1 Wisatawan

Menurut Spilane (1993) wisatawan adalah pengunjung sementara yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam di negara yang dikunjungi dan tujuan perjalanannya dapat digolongkan sebagai berikut :

- a) Pesiar yaitu untuk keperluan rekreasi, liburan, kesehatan, studi, keagamaan, olahraga.

- b) Hubungan dagang, sanak keluarga, handai taulan, konferensi-konferensi, misi.

Sedangkan yang dianggap wisatawan adalah :

- a) Mereka yang mengadakan perjalanan untuk kesenangan karena alasan keluarga, kesehatan, dan lain-lain.
- b) Mereka yang mengadakan perjalanan untuk keperluan pertemuan-pertemuan atau karena tugas-tugas tertentu (ilmu pengetahuan, tugas pemerintahan, diplomasi, agama, olahraga, dan lain-lain).
- c) Mereka yang mengadakan perjalanan dengan tujuan tertentu.
- d) Mereka yang datang dalam rangka perjalanan dengan kapal laut walaupun tinggal di suatu negara kurang dari 24 jam.

Menurut Pendit (1999) wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukrela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.

Menurut Dimiyati (2004) wisatawan, menurut asal negara dari mana mereka datang, dapat dibedakan menjadi wisatawan asing atau mancanegara (wisman) dan wisatawan dalam negeri atau wisatawan domestik (wisdom).

Menurut Mill (2000) wisatawan asing adalah setiap orang yang mengunjungi sebuah negara, selain dari negara yang biasa ditinggali untuk kurun waktu kurang lebih 24 jam. Wisatawan domestik adalah setiap iorang yang tinggal dalam sebuah negara, tanpa menghiraukan kewarganegaraannya, yang melakukan perjalanan ke sebuah tempat dalam negara tersebut selain dari tempat tinggalnya

selama kurun waktu tidak kurang dari 24 jam atau semalam untuk keperluan selain aktivitas yang mendapat bayaran di tempat yang dikunjunginya.

2.1.7.2 Hubungan Jumlah Wisatawan Dengan Penerimaan Daerah Dari Industri Pariwisata

Menurut Yoeti (2008) kedatangan wisatawan mancanegara atau nusantara merupakan sumber penerimaan bagi daerah atau negara, baik dalam bentuk devisa atau penerimaan pajak dan retribusi lainnya, disamping dapat meningkatkan kesempatan kerja.

Menurut Cohen (1984) dalam Pitana dan Diarta (2009) suatu destinasi wisata yang dikunjungi wisatawan dapat dipandang sebagai konsumen sementara. Jika wisatawan yang berkunjung ke destinasi tersebut sangat banyak, maka pengeluaran uang untuk membeli berbagai keperluan selama liburannya akan berdampak pada kehidupan ekonomi daerah tersebut, baik langsung maupun tidak langsung. Dampak tersebut antara lain :

- a) Dampak terhadap penerimaan devisa negara.
- b) Dampak terhadap pendapatan masyarakat.
- c) Dampak terhadap kesempatan kerja.
- d) Dampak terhadap harga-harga.
- e) Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan.
- f) Dampak terhadap kepemilikan dan control.
- g) Dampak terhadap pembangunan pada umumnya.
- h) Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Menurut Wahab (1996) wisatawan yang tiba disuatu negara asing, baik secara individu maupun dalam kelompok, apapun tujuan perjalanannya, akan membelanjakan uangnya selama menetap di daerah tujuan untuk membayar jasa-jasa atau barang wisata dan membeli jasa-jasa atau barang yang tidak berkaitan dengan wisata. Seluruh jumlah uang yang dibelanjakan merupakan jumlah penerimaan negara dari sektor pariwisata dan menjadi pola konsumsi wisatawan di negara tersebut. Semakin bertambah konsumsi wisatawan, semakin banyak pula jasa-jasa wisata yang diproduksi.

Secara teoritis, semakin banyak jumlah wisatawan dan semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut, paling sedikit untuk keperluan makan, minum dan penginapan selama tinggal di daerah tersebut. Berbagai macam kebutuhan wisatawan selama perjalanan wisatanya akan menimbulkan gejala konsumtif untuk produk-produk yang ada di daerah tujuan wisata. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan yang diterima oleh pemilik usaha di industri pariwisata dari pembayaran atas pelayanan yang diterima oleh wisatawan yang nantinya akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan retribusi bagi pemerintah daerah tujuan wisata setempat yang notabene merupakan komponen dari PAD industri pariwisata. Misalnya, pajak atas pelayanan hotel, restoran, hiburan ataupun retribusi di industri pariwisata. Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah, maka akan meningkatkan penerimaan daerah dari industri pariwisata di Jawa Tengah.

2.1.8 PDRB dan Hubungan PDRB di Industri Pariwisata dengan Penerimaan Daerah di Industri Pariwisata

2.1.8.1 PDRB

Menurut Todaro (2000), pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu, yang ditunjukkan dengan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB yang tinggi cenderung mendorong naiknya tingkat konsumsi perkapita yang selanjutnya menimbulkan intensif bagi diubahnya struktur produksi (pada saat pendapatan meningkat, permintaan akan barang manufaktur dan jasa pasti akan meningkat lebih cepat dari pada permintaan akan produk-produk pertanian) .

Menurut Nasrull (2010), PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Pada umumnya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata mempunyai tingkat sosial ekonomi yang tinggi. Mereka memiliki trend hidup dan waktu senggang serta pendapatan (income) yang relatif besar. Artinya kebutuhan hidup minimum mereka sudah terpenuhi. Mereka mempunyai cukup uang untuk membiayai perjalanan wisata. Semakin besar tingkat PDRB masyarakat maka semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata, yang pada akhirnya berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan daerah sektor pariwisata di Jawa Tengah.

2.1.8.2 Hubungan PDRB di Industri Pariwisata dengan Penerimaan Daerah di Industri Pariwisata

Salah Satu cara untuk melihat kemajuan perekonomian adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB, PDRB adalah merupakan nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa memperhatikan kepemilikan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini dihitung melalui 3 pendekatan, yaitu :

- Segi produksi, PDRB merupakan jumlah netto atas suatu barang dan jasa yang dihasilkan untuk unit-unit produksi dalam suatu wilayah dan lainnya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
- Segi pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa (pendapatan) yang diterima oleh faktor-faktor produksi karena ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
- Segi pengeluaran, PDRB merupakan jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga, pemerintah dan lembaga swasta non profit biasanya dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). (Sadono Sukirno,1994).

Dalam penyajiannya, PDRB selalu dibedakan atas dua, yakni atas dasar harga konstan dan atas dan dasar harga berlaku. Adapun defenisi pembagian PDRB ini adalah sebagai berikut:

- PDRB atas dasar harga berlaku adalah jumlah nilai barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan, atau pengeluaran yang dinilai sesuai dengan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan.
- PDRB atas dasar harga konstan adalah nilai barang dan jasa (komoditi) atau pendapatan, atau pengeluaran yang dinilai atas dasar harga tetap.

Nilai PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi karena nilai PDRB atas dasar harga konstan ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat besarnya perekonomian suatu daerah.

Menurut Dimiyati (2004), dalam perhitungan PDRB, seluruh lapangan usaha dibagi menjadi Sembilan sektor, yaitu :

1. Pertanian,
2. Pertambangan dan Penggalian,
3. Industri Pengolahan,
4. Listrik, gas dan air minum,
5. Bangunan,
6. Perdagangan, hotel dan restoran,
7. Angkutan dan komunikasi,
8. Keuangan, persewaan dan Jasa Perusahaan,
9. Jasa-jasa.

Keadaan perekonomian suatu Negara dapat dilihat dari PDRB nya, dimana pertumbuhan ekonomi itu sendiri dapat diukur dengan salah satu indikator yakni PDRB, sehingga dengan kesimpulan bahwa ketiga indikator tersebut, yakni

PDRB, keadaan ekonomi suatu wilayah dan PDRB adalah saling berkaitan satu sama lain.

PDRB yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh PDRB suatu wilayah, tentunya juga berperan terhadap peningkatan daya beli atau tingkat konsumsi masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Kemudian jika dikaitkan dengan pengadaan perjalanan wisata, tentunya PDRB yang dapat diindikasikan dengan PDRB, memiliki andil yang cukup positif terhadap pengadaan perjalanan wisata itu sendiri sebab pada umumnya orang-orang yang melakukan perjalanan wisata adalah orang-orang dengan tingkat sosial ekonomi yang tinggi. Mereka memiliki trend hidup dan waktu senggang serta pendapatan (*income*) yang cukup besar. Artinya kebutuhan hidup minimum mereka telah terpenuhi. Mereka mempunyai cukup uang untuk membiayai perjalanan wisata.

Semakin besar tingkat PDRB masyarakat yang dipengaruhi oleh PDRB maka semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata, yang pada akhirnya berpengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan daerah sektor pariwisata di Jawa Tengah.

2.1.9 Investasi di Industri Pariwisata dan Hubungan Investasi di Industri Pariwisata Dengan Penerimaan Daerah Dari Industri Pariwisata

2.1.9.1 Investasi di Industri Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, definisi penanaman modal (investasi) adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 UU

Nomor 25 Tahun 2007 dijelaskan bahwa investasi terbagi menjadi dua, yaitu PMDN dan PMA yang dapat didefinisikan sebagai berikut, penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Menurut Dornbusch, Fisher dan Startz, (2004) dalam penelitian Sitompul (2007) investasi adalah permintaan barang dan jasa untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Case and Fair (2007), investasi adalah aliran yang meningkatkan persediaan modal. Meskipun modal diukur pada titik waktu tertentu (suatu persediaan), investasi diukur atas periode waktu (suatu aliran). Aliran investasi meningkatkan persediaan (simpanan) modal.

Investasi juga menghimpun akumulasi modal dengan membangun sejumlah gedung, peralatan ataupun berbagai kegiatan usaha yang berguna bagi kegiatan produktif, maka output potensial suatu Negara atau lebih khususnya dalam hal ini daerah akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat. Dapat disimpulkan bahwa investasi memiliki peranan penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan.

Berdasarkan model pertumbuhan Harrod-Domar, yang secara jelas menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan GDP ($\Delta Y/Y$) ditentukan secara bersama-sama oleh rasio tabungan nasional, s , serta rasio modal-output nasional, k . Sederhananya, agar bisa tumbuh dengan pesat, setiap perekonomian harus menabung dan menginvestasikan sebanyak mungkin bagian dari GDP-nya. Semakin banyak yang ditabung dan kemudian diinvestasikan, maka laju pertumbuhan perekonomian akan semakin cepat, menurut Todaro (2006).

Persamaan dalam model ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{k}$$

Dimana fungsi tabungan dan investasi dinyatakan sebagai berikut:

$$S = sY \text{ dan } S = I = \Delta K$$

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan investasi di industri pariwisata adalah realisasi investasi baik PMDN ataupun PMA yang ditanamkan dalam kegiatan usaha yang berkaitan dengan industri pariwisata, yaitu investasi pada jasa agen perjalanan, hotel bintang, restoran dan penyediaan makanan keliling, penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, jasa biro perjalanan wisata, kegiatan hiburan, serta kegiatan kesenian dan kreativitas.

2.1.9.2 Hubungan Investasi di Industri Pariwisata Dengan Penerimaan Daerah Dari Industri Pariwisata

Pertumbuhan industri pariwisata salah satunya diukur dengan besarnya investasi yang ditanamkan pada industri tersebut. Jenis-jenis investasi pada industri pariwisata dibagi menjadi tiga, yaitu investasi modal pribadi, investasi pemerintah, dan investasi swasta. Investasi modal pemerintah cenderung terkait

dengan pembangunan prasarana transportasi (bandara, pelabuhan, jalan) dan pusat-pusat konvensi. Investasi modal pribadi biasanya diwujudkan dalam bentuk sarana akomodasi non hotel, sedangkan investasi swasta cenderung berupa sarana akomodasi hotel dan transportasi (Anggraini, 2004).

Investasi langsung dapat membantu negara- negara berkembang mengatasi masalah kekurangan tabungan dan kekurangan mata uang asing dan mata uang dalam negeri , maka ditinjau dari sudut ini , penanaman modal baik asing maupun dalam negeri akan mempertinggi tingkat penanaman modal dan selanjutnya mempercepat tingkat pembangunan ekonomi menurut Sukirno (1985)

Begitu juga dengan investasi di industri pariwisata, salah satunya yaitu investasi pada usaha perhotelan yang diharapkan mampu mengembangkan pembangunan atau pendirian hotel-hotel baru atau pengadaan kamar-kamar pada hotel-hotel yang sudah ada. Dengan tersedianya hotel yang memadai, para wisatawan tidak segan untuk berkunjung kesuatu daerah, terlebih jika hotel tersebut nyaman untuk disinggahi. Sehingga mereka akan merasa lebih aman, nyaman dan betah untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata. Pembayaran atas pelayanan hotel yang diterima oleh wisatawan akan meningkatkan pendapatan usaha perhotelan yang nantinya akan meningkatkan jumlah penerimaan pajak hotel bagi pemerintah daerah tujuan wisata setempat yang notabene merupakan salah satu komponen dari PAD industri pariwisata. Dapat disimpulkan bahwa investasi di industri pariwisata berpengaruh secara tidak langsung terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata. Oleh karena itu, industri pariwisata terutama kegiatan yang berkaitan dengan penginapan yaitu

hotel, baik berbintang maupun melati akan memperoleh pendapatan yang semakin meningkat apabila para wisatawan berkunjung dan menginap sehingga hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari industri pariwisata. Hal ini tidak hanya berlaku pada investasi usaha perhotelan saja, melainkan pada investasi diindustri pariwisata lainnya.

2.1.10 Jumlah Objek Wisata dan Hubungan Jumlah Objek Wisata Dengan Penerimaan Daerah Dari Industri Pariwisata

2.1.10.1 Jumlah Objek Wisata

Indonesia sebagai negara yang memiliki keindahan alam serta keanekaragaman budaya yang mempunyai kesempatan untuk menjual keindahan alam dan atraksi budayanya kepada wisatawan baik wisatawan mancanegara maupun nusantara yang akan menikmati keindahan alam dan budaya tersebut. Tentu saja kedatangan wisatawan tersebut akan mendatangkan penerimaan bagi daerah yang dikunjunginya. Bagi wisatawan mancanegara yang datang dari luar negeri, kedatangan mereka akan mendatangkan devisa bagi negara (Nasrull,2010).

Begitu juga dengan Jawa Tengah yang merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) memiliki potensi pariwisata yang cukup besar, khususnya wisata alam dan wisata budaya. Dengan demikian banyaknya jumlah obyek wisata yang ada, maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Jawa Tengah, baik melalui pajak daerah maupun retribusi daerah.

2.1.10.2 Hubungan Jumlah Objek Wisata Dengan Penerimaan Daerah Dari Industri Pariwisata

Salah satu faktor yang membuat seseorang untuk mengunjungi suatu daerah adalah karena adanya obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi di daerah tersebut. Hal ini tidak lepas dari peran pemerintah, swasta dan masyarakat untuk menciptakan atau membuka obyek-obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi. (Nasrull,2010)

Jawa Tengah merupakan salah satu Daerah Tujuan Wisata (DTW) potensi yang dimiliki beraneka ragam, baik obyek wisata alam, budaya, maupun buatan yang terletak diberbagai tempat di Jawa Tengah. Setiap tahunnya dapat bertambah maupun berkurang. Penambahan dapat terjadi apabila pemerintah daerah membangun obyek wisata baru, yaitu berupa obyek wisata buatan, atau membuka obyek wisata alam yang sebelumnya tertutup untuk umum. Sedangkan pengurangan bisa terjadi apabila pemerintah daerah menutup obyek wisata dikarenakan sedang dalam perbaikan atau tidak adanya dana untuk melakukan perawatan terhadap suatu obyek wisata sehingga ditutup untuk umum

2.2 Penelitian Terdahulu

- a. **Syamsul Huda (2009); Analisis Penerimaan Devisa Sektor Pariwisata dan Faktor-faktor Yang Mempengaruhi di Provinsi Jawa Timur.**

Dalam penelitian terdahulu oleh Syamsul Huda, mahasiswa Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi devisa sektor pariwisata di Provinsi Jawa Timur. Dari

hasil Uji t semua variabel kecuali objek wisata berpengaruh signifikan terhadap penerimaan devisa sektor pariwisata

b. **Firsti Saputri Anggraini (2004); Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di DKI Jakarta**

Dalam penelitian terdahulu oleh Fitri Saputri Anggraini (2004), mahasiswi Fakultas Ekonomi Institut Pertanian Bogor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di DKI Jakarta. Hasil penelitiannya menyatakan, nilai tukar mata uang asing tidak berpengaruh. Investasi sektor perhotelan dan jumlah biro perjalanan wisata berpengaruh positif. Faktor keamanan berpengaruh negative.

c. **Arief Hartoko (2009); Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pendapatan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kotamadya Malang**

Dalam penelitian terdahulu oleh Arief Hartoko (2009), mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan, investasi sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara terhadap pendapatan daerah di Kota Malang. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel jumlah wisatawan dan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara tidak berpengaruh secara nyata dan

positif, sedangkan variable investasi sarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata berpengaruh secara nyata dan positif

- d. **Nasrul Qadarrochman (2010); Analisis Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata di Kota Semarang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya.**

Dalam penelitian terdahulu oleh Nasrul Qadarrochman (2010), mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kota Semarang dan menganalisis faktor yang paling berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kota Semarang. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa variabel jumlah obyek wisata, variabel jumlah wisatawan dan variabel tingkat hunian hotel dinyatakan signifikan semua, sedangkan variable PDRB dinyatakan tidak signifikan

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Nama dan Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil
Syamsul Huda (2009), Analisis Penerimaan Devisa Sektor Pariwisata dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi di Provinsi Jawa Timur	Variabel Independen: Jumlah wisatawan, objek wisata, hotel, biro perjalanan, rata-rata lama tinggal, rata-rata pengeluaran wisatawan, kurs valuta asing Variabel Dependen: Penerimaan devisa sektor pariwisata	Regresi linear berganda	Dari hasil Uji t semua variabel kecuali objek wisata berpengaruh signifikan terhadap penerimaan devisa sektor pariwisata
Fitri Saputri Anggraini 2004, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara di DKI Jakarta	Variabel Independen: Investasi sektor perhotelan, jumlah biro perjalanan wisata, faktor keamanan (dummy), nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah Variabel Dependen: Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara di DKI Jakarta	Regresi linier berganda	Nilai tukar mata uang asing tidak berpengaruh. Investasi sektor perhotelan dan jumlah biro perjalanan wisata berpengaruh positif. Faktor keamanan berpengaruh negative.
Arief Hartoko 2009, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Daerah dari Sektor Pariwisata di Kotamadya Malang	Variabel Independen: Jumlah wisatawan, investasi sarana pariwisata, usaha jasa pariwisata, rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara Variabel Dependen: Pendapatan daerah dari sektor pariwisata	Regresi linear berganda	Variabel jumlah wisatawan dan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara tidak berpengaruh secara nyata dan positif, sedangkan variable investasi sarana pariwisata dan usaha jasa pariwisata berpengaruh

			secara nyata dan positif
Nasrul Qadarochman 2010, Analisis Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata Di Kota Semarang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya	Variabel Independen: Jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, PDRB Variabel Dependen: Penerimaan daerah sektor pariwisata	Regresi linier berganda	variabel jumlah obyek wisata, variabel jumlah wisatawan dan variabel tingkat hunian hotel dinyatakan signifikan semua, sedangkan variabel PDRB dinyatakan tidak signifikan

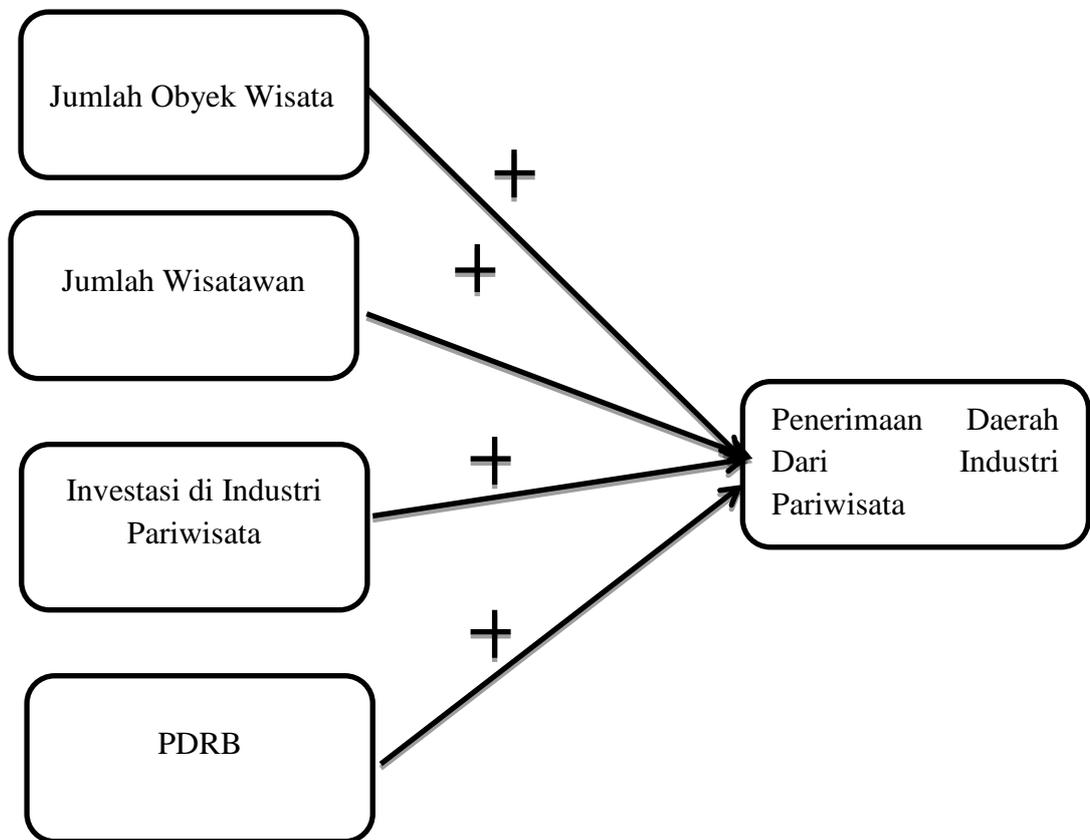
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Pemberlakuan otonomi daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pengembangan otonomi daerah yang luas dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, termasuk pemberian kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan daerahnya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam rangka membiayai jalannya roda pemerintahan, serta pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerahnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah yaitu dengan mengoptimalkan potensi dalam industri pariwisata. Pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah. Keterkaitan industri

pariwisata dengan penerimaan daerah berjalan melalui jalur Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada industri pariwisata. Dari segi ekonomi, pariwisata dapat memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah yang bersumber dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi daerah atau dapat mendatangkan devisa dari para wisatawan mancanegara yang berkunjung. Keberhasilan pengembangan industri kepariwisataan, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana kepariwisataan merupakan komponen utamanya dengan memperhatikan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti: jumlah obyek wisata yang ditawarkan, jumlah wisatawan yang berkunjung baik domestik maupun mancanegara, tingkat hunian hotel, serta investasi di industri pariwisata Jawa Tengah serta memiliki berbagai jenis wisata pilihan yang dapat dikunjungi wisatawan, mulai dari taman rekreasi, pusat-pusat perbelanjaan, event, wisata kuliner, wisata budaya dan wisata bahari. Sumbangan industri pariwisata Jawa Tengah terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah selama lima tahun terakhir cenderung lebih kecil daripada sumbangan industri non pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah dengan rata-rata 2,62 persen. Kontribusi terendah industri pariwisata terjadi pada tahun 2008 sebesar 1,40 persen dan terus mengalami peningkatan dan penurunan hingga kontribusi pariwisata tertinggi dapat dicapai pada tahun 2011 sebesar 3,50 persen. Kemudian kembali mengalami penurunan ditahun 2012 sebesar 3,30 persen. Hal ini menggambarkan bahwa industri pariwisata di Jawa Teangah belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah karena nilai kontribusi industri pariwisata cenderung lebih kecil bila

dibandingkan dengan kontribusi industri non pariwisata. Walaupun industri pariwisata bukan menjadi industri yang mendapat prioritas utama dalam meningkatkan perekonomian daerah, namun industri pariwisata bisa menjadi industri yang sangat potensial dalam memperbaiki struktur ekonomi daerah, seharusnya dengan meningkatnya jumlah fasilitas penunjang pariwisata seperti penginapan dan jasa perjalanan pariwisata yang ditawarkan setiap tahunnya, jumlah pengunjung dan pendapatan sektor pariwisata di Jawa Tengah juga dapat lebih ditingkatkan lagi, dengan demikian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Jawa Tengah. Oleh karena itu, perlu dianalisis apakah variabel jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara, PDRB, investasi di industri pariwisata, serta jumlah objek wisata berpengaruh terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Jawa Tengah dengan menggunakan alat analisis yaitu regresi linear berganda dengan pendekatan OLS (Ordinary Least Square).

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian dan perumusan masalah di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel jumlah wisatawan diduga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Jawa Tengah.
2. Variabel PDRB diduga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Jawa Tengah.

3. Variabel investasi diindustri pariwisata diduga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Jawa Tengah.
4. Variabel jumlah objek wisata diduga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan daerah dari industri pariwisata di Jawa Tengah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sedangkan variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Soegiyono,2003). Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan daerah sektor pariwisata, sedangkan variabel bebasnya adalah jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, investasi industri pariwisata dan PDRB.

3.1.2 Definisi Operasional

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur suatu variabel yang akan digunakan. Terdapat empat variabel bebas dan satu variabel terikat yang digunakan dalam analisis penerimaan daerah dari industri pariwisata di Kab/Kota Jawa Tengah. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah :

1. Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata

Pendapatan dari sektor pariwisata yang termasuk dalam penerimaan daerah tahun 2008-2012 diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, retribusi tempat penginapan, retribusi tempat rekreasi. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala kontinyu dengan satuan ribuan rupiah (Ribu Rp/tahun).

2. Jumlah Obyek Wisata

Merupakan banyaknya obyek wisata yang ada di Jawa Tengah tahun 2008-2012 (buah/tahun). Jumlah obyek wisata merupakan jumlah obyek wisata dalam masing-masing kota/kabupaten di Jawa Tengah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dalam 1 tahun (buah obyek wisata/kota/tahun)

3. Jumlah Wisatawan

Merupakan besarnya jumlah wisatawan baik mancanegara maupun nusantara yang berkunjung ke Jawa Tengah tahun 2008-2012 (orang/tahun). Jumlah wisatawan total yang mengunjungi masing-masing kota/kabupaten di Jawa Tengah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dalam 1 tahun (orang wisatawan/tahun).

4. Investasi di Industri Pariwisata

Investasi di industri pariwisata merupakan besarnya jumlah investasi baik PMDN maupun PMA yang bergerak pada kegiatan usaha hotel bintang, hotel melati, restoran, serta kegiatan hiburan, kesenian dan

kreativitas di Jawa Tengah. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala kontinyu dengan satuan ribu rupiah (Ribu Rp/tahun).

5. PDRB

PDRB merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam periode tertentu, yang diproksi atau dihitung dengan PDRB atas dasar harga konstan 2000 di Jawa Tengah tahun 2008-2012 (Juta Rp/tahun). PDRB dihitung berdasarkan PDRB masing-masing kota/kabupaten di Jawa Tengah yang dijadikan sampel dalam penelitian ini (Juta Rp/tahun).

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, baik dari literatur, studi pustaka, atau penelitian-penelitian sejenis sebelumnya yang berkaitan dalam penelitian ini.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kab/Kota Jawa Tengah, Dinas Pariwisata Kab/Kota Jawa Tengah, literatur-literatur lainnya seperti buku-buku, dan jurnal-jurnal ekonomi. Data yang digunakan antara lain adalah jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, investasi di industri pariwisata, PDRB perkapita, dan penerimaan daerah dari sektor pariwisata di Kab/Kota Jawa Tengah tahun 2008-2012.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan realistis. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode studi pustaka, yang diperoleh dari instansi-instansi terkait, buku referensi, maupun jurnal-jurnal ekonomi.

Data yang digunakan adalah data time series yaitu data runtut waktu yang merupakan data yang dikumpulkan, dicatat, atau diobservasi sepanjang waktu secara berurutan, dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

Agar dapat menggunakan analisis regresi linear berganda dengan pendekatan *ordinary least square (OLS)* maka model persamaan harus terbebas dari asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas uji Heteroskedastisitas, uji Autokorelasi, uji Multikolinearitas, dan uji Normalitas.

3.4.1.1 Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika :

1. Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau di sekitar angka 0.
2. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.

3. Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan menyebar kembali.
4. Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedasitas.

3.4.1.2 Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel gangguan pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel yang pada periode lain, dengan kata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, penggunaan lag pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter yang diestimasi menjadi bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien.

Dalam penelitian ini digunakan uji Durbin-Watson untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi. Uji Durbin-Watson digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan dengan syarat adanya intercept (konstanta) dalam model regresi serta tidak ada variabel lag diantara variabel bebas (Gujarati,2003).

3.4.1.3 Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan linear (korelasi) yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi (Gujarati, 2003).Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).Model regresi yang baik seharusnya

tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilakukan dengan menggunakan regresi parsial dengan *Auxiliary Regression* yaitu regresi antar variabel independennya, kemudian akan didapatkan nilai R² dari masing-masing regresi tersebut.

Jika nilai R² masing lebih tinggi bila dibandingkan dengan nilai R² model utama, maka dalam regresi parsial tersebut terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2006). Dapat juga dilakukan dengan mengukur nilai *Tolerance* dan menguji *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *Tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Jika suatu variabel bebas memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 atau VIF < 10, maka variabel bebas tersebut tidak mengalami multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya, begitu pula sebaliknya.

3.4.1.4 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2006). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistic. Namun uji normalitas dengan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati secara visual kelihatan normal, pada hal secara statistic bisa sebaliknya. Oleh sebab itu,

penelitian ini menggunakan analisis statistic dengan uji Kolmogorov-Smirnov untuk melihat apakah model regresi terdistribusi secara normal.

3.4.2 Analisis Regresi

Analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, yaitu regresi yang memiliki satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independent. Untuk mengetahui hubungan fungsional antara beberapa variabel bebas (independent) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (dependent) digunakan regresi linier. Bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu_i$$

Keterangan :

i	=	Observasi ke i
μ	=	Kesalahan yang disebabkan faktor acak
α	=	Konstanta
Y	=	Penerimaan Daerah Sektor Pariwisata
X_1	=	Jumlah Obyek Wisata
X_2	=	Jumlah Wisatawan
X_3	=	Investasi Industri Pariwisata
X_4	=	PDRB
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$	=	Parameter elastisitas

Alasan dipilih bentuk fungsi logaritma adalah :

1. Koefisien regresi menunjukkan elastisitas

2. Untuk mendekati skala data sehingga terhindar dari heteroskedastisitas

3.4.3 Uji Kriteria Statistik

3.4.3.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Gujarati (2003) koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat terbatas. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Namun, koefisien determinasi mempunyai kekurangan yaitu bias terhadap jumlah variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, R^2 menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas (Ghozali, 2006).

3.4.3.2 Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit*)

Uji kelayakan model dilakukan dengan menggunakan uji F. Uji F dilakukan untuk mengetahui ketepatan model yang dipergunakan untuk memprediksi variabel terikat dalam penelitian ini yaitu penerimaan daerah sector pariwisata. Hipotesis nol (H_0) yang hendak di uji adalah apakah model tidak dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

Hipotesis alternatifnya (H_a) adalah apakah model dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

Dasar pengambilan keputusan :

1. Dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel

Apabila F hitung $>$ F tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima

Apabila F hitung $<$ F tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Dengan tingkat probabilitas 5 persen ($\alpha = 0,05$) dan nilai df (*degree of freedom*) = $(n-k-1)$.

2. Dengan menggunakan angka signifikansi

Apabila angka probabilitas $>$ 0,05 maka H_0 diterima dan H_a ditolak

Apabila angka probabilitas $<$ 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima

3.4.3.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pengujian signifikansi koefisien regresi secara parsial digunakan uji t (t test), uji hipotesisnya:

1) Menentukan formulasi hipotesis

1. Uji t untuk variabel jumlah wisatawan

- $H_0 : b_1 \leq 0$ (tidak ada pengaruh signifikan antara jumlah wisatawan dengan jumlah penerimaan daerah pariwisata di Jawa Tengah).

- $H_a : b_1 > 0$ (ada pengaruh positif antara jumlah wisatawan dengan jumlah penerimaan daerah pariwisata di Jawa Tengah).
2. Uji t untuk variabel PDRB
- $H_0 : b_2 \leq 0$ (tidak ada pengaruh signifikan antara PDRB dengan jumlah penerimaan daerah industri pariwisata di Jawa Tengah).
 - $H_a : b_2 > 0$ (ada pengaruh positif PDRB dengan jumlah penerimaan daerah industri pariwisata di Jawa Tengah).
3. Uji t untuk variabel investasi industri pariwisata
- $H_0 : b_3 \leq 0$ (tidak ada pengaruh signifikan antara investasi industri pariwisata dengan jumlah penerimaan daerah industri pariwisata di Jawa Tengah).
 - $H_a : b_3 > 0$ (ada pengaruh positif antara investasi industri pariwisata dengan jumlah penerimaan daerah industri pariwisata di Jawa Tengah).
4. Uji t untuk variabel jumlah objek wisata
- $H_0 : b_4 \leq 0$ (tidak ada pengaruh signifikan antara jumlah objek wisata dengan jumlah penerimaan daerah industri pariwisata di Jawa Tengah).
 - $H_a : b_4 > 0$ (ada pengaruh positif antara jumlah objek wisata dengan jumlah penerimaan daerah industri pariwisata di Jawa Tengah).

2) Kriteria pengujian

Uji ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan t tabel. Rumus untuk memperoleh nilai t hitung adalah:

$$t \text{ hitung} = \frac{\beta_i}{se(\beta_i)}$$

dengan:

β = koefisien regresi

se = standar eror

Dasar pengambilan keputusan :

1. Dengan membandingkan nilai t hitung dengan t tabel :
 - a) Apabila t hitung > t tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.
 - b) Apabila t hitung < t tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen.

Dengan angka signifikan 5 % ($\alpha = 0,05$) dan nilai df (degree of freedom) = n-k

2. Dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi
 - a) Apabila angka probabilitas > 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

- b) Apabila angka probabilitas $< 0,05$, maka H_0 ditolak atau H_a diterima